

PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Abstraksi

Masalah penduduk merupakan masalah yang cukup kompleks dan rumit, terutama di negara ketiga atau Negara Sedang Berkembang termasuk juga Indonesia. Dalam menghadapi masalah tersebut, Indonesia berupaya untuk menekan tingkat kelahiran dengan program Keluarga Berencana (KB).

Saran untuk tercapainya program Keluarga Berencana (KB) tersebut melalui kegiatan posyandu dan untuk menyukseskan program Keluarga Berencana (KB) perlu adanya kerjasama antara pemerintah, organisasi kaum ibu, dan lembaga swadaya masyarakat.

Kata kunci :

Negara sedang berkembang, Keluarga Berencana.

A. PENDAHULUAN

Masalah kependudukan dapat diartikan sebagai masalah pertambahan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Adapun pertambahan penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara karena pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan menyebabkan kesempatan kerja baru sangat terbatas. Sebagai akibat dari keadaan tersebut, maka pertumbuhan penduduk biasanya dapat menimbulkan masalah-masalah seperti, timbulnya

struktur usia atau umur muda yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran yang merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi karena sebagian dari pendapatan yang sebenarnya harus ditabung untuk kemudian diinvestasikan bagi pembangunan ekonomi terpaksa harus dikeluarkan untuk keperluan sandang dan pangan mereka, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin series, urbanisasi dan sebagainya.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi secara langsung dapat menimbulkan masalah bagi negara yang bersangkutan, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar.

Menurut Lincolyn Arsyad (1997:46) terdapat tiga ciri pokok yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan Indonesia dewasa ini yaitu:

1. Laju pertumbuhan penduduk yang perlu diturunkan.
2. Penyebaran penduduk antar daerah yang kurang seimbang.
3. Kualitas kehidupan penduduk yang perlu ditingkatkan.

Masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antar pedesaan dan perkotaan dapat menimbulkan masalah yang serius, dan hampir disemua propinsi di Indonesia

tampak adanya gejala makin meningkatnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk daerah perkotaan lebih cepat dibandingkan daerah pedesaan, namun jumlah penduduk daerah pedesaan tetap lebih besar. Dari uraian tersebut maka pertambahan atau peningkatan jumlah penduduk sangat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat perpindahan penduduk dan kematian.

B. USANA MENEKAN ANGKA PENDUDUK

Masalah penduduk merupakan masalah yang cukup kompleks dan rumit, terutama di negara - negara ketiga atau Negara Sedang Berkembang termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah tersebut, Indonesia berupaya untuk menekan tingkat kelahiran dengan program Keluarga Berencana / KB. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan (Kompas, 10 Februari 2004) adanya kerjasama antara pemerintah, organisasi kaum ibu, dan lembaga swadaya masyarakat akan

sangat membantu menyukseskan program Keluarga Berencana (KB).

Dengan konsentrasi dan potensi penambahan penduduk yang cenderung lebih besar di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, kerja sama itu dapat membantu menyukseskan program Keluarga Berencana (KB). Peningkatan kerjasama diharapkan dapat menekan pertumbuhan penduduk yang sekarang ini 1,5 persen per tahun dengan jumlah penduduk 210 juta jiwa dengan penduduk bertambah 3 juta setiap tahunnya. Lebih lanjut beliau mengatakan Indonesia pastidapat melakukannya dengan hasil yang Lebihbaik dengan tetap menempatkan penghormatan terhadap norma agama, adat - istiadat dan budaya.

Namun hal tersebut bukan berarti tanpa kendala karena sesuatu hal yang diinginkan tidak serta merta terjadi begitu saja (bim salabim), kendala-kendala tersebut menurut pendapat Irawan dan Suparmoko (199: 65) dapat berupa

1. Adanya kemelaratn dan buta huruf di negara-negara sedang berkembang bersama-sama dengan organisasi sosial yang masih tradisional bertindak sebagai penghambat

pelaksanaan Keluarga Berencana (KB).

2. Perkembangan ilmu obat-obatan dan ilmu kesehatan masih merupakan faktor psikologi dari orang-orang yang menjadi akseptor. Ilmu-ilmu tersebut belum dapat menciptakan alat pengontrol kehamilan yang sungguh-sungguh diterima dan dapat dipakai dengan baik sehingga dapat mengurangi masalah di negara-negara berkembang.

Kemajuan ilmu pengetahuan memang telah berhasil menyediakan metode kontrasepsi yang baru dan pemerintah pun mendorong penduduk untuk memakainya, ini bukan masalah yang sulit, tetapi bagaimana pengendalian kelahiran atau kehamilan itu dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat terutama bagimasyarakat yang berpenghasilan rendah atau kurang mampu, sehingga pengendalian kelahiran (*Birth Control*) sulit sekali dijalankan. Hal ini disebabkan antara lain adanya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang pada umumnya masih minim. Untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup maka perlu membatasi kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB) yang

nantinya cenderung untuk mengurangi pertumbuhan penduduk.

Sebelum Keluarga Berencana (KB) diakui sebagai program nasional, poinir dalam usaha Keluarga Berencana (KB) adalah organisasi dan badan-badan swasta sukarela secara terbatas berperan, baik dalam program-program pendidikan, latihan dan penyaluran informasi maupun dalam penelitian dan pelayanan klinik. Sedangkan peranan pemerintah adalah melakukan supervisi dan menyokong program tersebut selama program ini searah dengan program pemerintah. Program Keluarga Berencana (KB) Nasional dapat mempercepat turunnya fertilitas disuatu negara.

Dengan adanya program ini masyarakat mempunyai kesempatan lebih luas untuk memperoleh dan memilih alat-alat kontrasepsi untuk mengatur jumlah anak yang mereka inginkan. Dengan segala usahanya, Keluarga Berencana (KB) berkembang secara luas dan akhirnya diakui sebagai program Nasional.

C. KELUARGA BERENCANA (KB)

Keluarga Berencana (KB) adalah upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui

pendewasaan usiaperkawinan, pengaturan kelahiran, peningkatan kesejahteraan untukmewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Sedangkan pengertian Keluarga Berencana (KB) menurut pendapat Usep K. (1990 : 214), berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional Ulahma' tahun 1983 di Jakarta, adalah : suatu ikhtiar atau usaha manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan hukum agama, Undang-Undang Negara dan Pancasila, demi mendapat kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.

Sarana untuk tercapainya Keluarga Berencana (KB) adalah melalui kegiatan posyandu. Dimana posyandu ditujukan untuk masyarakat lapisan bawah pada umumnya dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan, sedangkan sasaran dari kegiatan posyandu antara lain:

1. Bayi berusia kurang dari 1 tahun.
2. Anak Balita usia 1 s/d 5 tahun.
3. Ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nifas.
4. Wanita atau Perempuan Usia Subur(PUS)

Tujuan dari posyandu :

1. Mempercepat penurunan

angkakelahiran , angka kematian bayi dan anak balita.

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Posyandu merupakan usaha masyarakat yang terdapat perpaduan antara pelayanan petugas Puskesmas serta masyarakat secara aktif dan positif. Peran serta aktif masyarakat yang tinggi akan meningkatkan daya guna keberhasilan Posyandu yang merupakan bentuk operasional dari pendekatan strategi keterpaduan Keluarga Berencana (KB) kesehatan dalam rangka mempercepat penurunan angka fertilitas, angka kematian bayi atau balita dalam rangka mempercepat terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dan pada akhirnya pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menurun.

D. HAL-HAL YANG

MEMPENGARUNI KELUARGA BERENCANA

Program Keluarga Berencana (KB) dari tahun ke tahun berkembang dengan cukup pesat di dalam mencapai tujuannya yakni terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dalam mencapai tujuannya tersebut,

banyak potensi yang dikerahkan, baik yang berasal dari pemerintah maupun organisasi kaum ibu, dan lembaga swadaya masyarakat. Sedangkan sumber-sumber yang tersedia sebagai faktor penunjang keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) telah dimobilisasi dan dimanfaatkan seoptimal mungkin guna tercapainya tujuan tersebut, keberhasilan suatu program atau kebijakan telah dirumuskan dalam bentuk kegiatan operasional di lapangan. Pada dasarnya suatu kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komunikasi (*communication*)

Bahwa setiap kebijakan yang dibuat maka akan melibatkan banyak pihak demikian pula dalam pelaksanaannya, sehingga perlu diadakan hubungan organisasional yang baik dengan pihak-pihak terkait.

2. Kesiediaan (*disposisi*)

Pelaksanaan kebijakan diusahakan mempunyai kepentingan yang sama, di mana masing-masing pihak dituntut kesediaannya dan perasaan tanggung jawab terhadap keberhasilan kebijakan yang telah dirumuskan.

3. Kekuatan Dukungan (*resources*)

Dukungan di sini antara lain: daya, dana, sarana, dan prasarana yang memadai serta dukungan nyata dari pemerintah.

4. Struktur Birokrasi

Sasaran organisasi yang baik disertai wewenang tugas dan tanggung jawab pada setiap implementator akan mempercepat keberhasilan suatu kebijakan.

Keempat faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut di atas saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, namun pada akhirnya menuju pada satu tujuan yaitu keberhasilan suatu kebijakan yang telah dirumuskan ditunjang dengan keadaan sosial, ekonomi, dan kondisi politik juga mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Demikian pula program Keluarga Berencana (KB) yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebagai program nasional, juga melibatkan banyak pihak, baik itu pihak pemerintah maupun organisasi kaum ibu, dan lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kepentingan dan kepedulian pada program pemerintah tersebut.

Program pengendalian

pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) disesuaikan dengan pertumbuhan perekonomian, norma agama, adat - istiadat dan nilai-nilai budaya. Darn sini nampak bahwa program Keluarga Berencana harus disesuaikan dengan keadaan penduduk masing-masing daerah. Pada dasarnya penyesuaian itu tetap mempunyai prinsip dasar yang kemudian diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Dengan prinsip dasar tersebut, program Keluarga Berencana (KB) harus mampu memotivasi sebuah keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mendapatkan pelayanan yang memuaskan darn institusi kesehatan dan memiliki kebebasan di dalam memilih alat-alat kontrasepsi.

Dalam kenyataan tersebut banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Keluarga Berencana (KB), karena banyaknya pihak yang terlibat di dalamnya. Keterlibatan tersebut berkenaan dengan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan program, terlebih lagi kesadaran dari setiap pasangan atau peserta akseptor adalah faktor yang

paling utama.

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) adalah:

1. Stabilitas politik yang mantap, karena dengan kemajuan, stabilitas politik yang mantap program Keluarga Berencana (KB) akan dapat terlaksana dengan baik.
2. Kemajuan ekonomi yang tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita.
3. Kemajuan sosial yang tercermin pada kemajuan pendidikan.
4. Prioritas yang tinggi yang diberikan oleh pemerintah dan komitmen yang besar dari pemerintah.

Hal tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), yang oleh DPR berencana mengamandemenkan UU tersebut. Pertimbangan utama amandemen UU No.10/1992 karena tidak mengakomodasi perubahan zaman, termasuk penanganan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) di era otonomi daerah dan globalisasi. Hampir semua bab dalam UU No. 10/1992, 60 persen akan

dirubah, perubahan tersebut diantaranya tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penurunan angka kematian, mobilitas penduduk, keterpaduan kebijakan kependudukan dan pembangunan, serta pengaturan kehamilan.

Saat ini persoalan Kependudukan menjadi tanggungjawab Departemen Dalam negeri sedangkan Keluarga Berencana (KB) dibawah Departemen Kesehatan (Kompas, 11 Februari 2004).

F. KAITAN POS YANDU DAN PROGRAM KELUARCA BERENCANA (KB) DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUNAN PENDUDUK

Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kesejahteraan sosial dan bertambahnya anggota pada semua lembaga atau organisasi kesejahteraan sosial menyebabkan suatu organisasi masyarakat membentuk hubungan kemasyarakatan untuk menginformasikan dan mengembangkan program lembaga atau organisasi kesejahteraan sosial masyarakat guna mencapai sasarnya.

Pentingnya Keluarga Berencana (KB) dan Posyandu didasarkan pada

hubungan antara peserta Keluarga Berencana (KB) dengan para petugasnya melalui pengenalan pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan. Kegiatan pengenalan pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan tersebut, merupakan kegiatan dalam gerakan Keluarga Berencana (KB) Nasional. Pada dasarnya penyuluhan berupaya mendorong terjadinya perubahan pengetahuan, sikap, dan praktek masyarakat serta perilaku masyarakat yang berkaitan dengan Keluarga Berencana (KB) sehingga masyarakat bersedia melaksanakan secara mantap dan bertanggung jawab. Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) diharapkan menggugah keikutsertaan segenap lapisan masyarakat dan berlangsung secara terus-menerus tanpa ada paksaan. Selain penyuluhan terdapat pula pelayanan melalui Posyandu, karena Posyandu merupakan pos pelayanan masyarakat yang biayanya terjangkau dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Adanya pelayanan yang baik dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dan ketersediaan peralatan kontrasepsi yang cukup, selain akan meningkatkan jumlah akseptor

Keluarga Berencana (KB) juga akan meningkatkan kegiatan yang dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi. Dan pada akhirnya pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menurun.

F. PENUTUP

Dari uraian di atas, menurut Soetedjo Moeljodiharjo (1990: 8) dapat dipahami dan disimpulkan bahwa keberadaan Posyandu berkaitan dengan keberhasilan Keluarga Berencana Nasional yang mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Kepedulian dan partisipasi dari masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
2. Pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga.
3. Institusi masyarakat baik formal maupun non formal telah memberikan sumbangan yang berarti dalam pencapaian keberhasilan kependudukan dan keluarga sejahtera.

Maka dengan keberhasilan kegiatan Posyandu dan gerakan Keluarga Berencana Nasional yang dapat berpengaruh pada penurunan angka kelahiran dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan

penduduk di Indonesia dan dapat membantu pemerintah dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dan prioritas pembangunan lainnya. Pada akhirnya bahwa program kesehatan termasuk

Keluarga Berencana (KB) dan kegiatan pemerintah lainnya benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan dan Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta, 1992
- Kompas, Edisi 10 Februari 2004
- Kompas, Edisi 11 Februari 2004
- Lincoln A, *Ekonomi Pembangunan*, STIE - YKPN, Yogyakarta, 1997
- Said Rush, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, LP3ES, Jakarta, 1996
- Usep F, *Umat Islam dan Gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia*, CV Kuning Masyarakat, Jakarta, 1990